



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/Kep.25-Hukham/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat di tahun 2025, disusun program perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9B4C994453>

9B4C994453

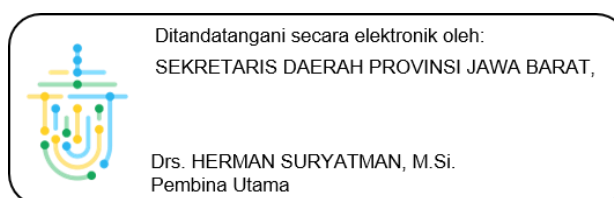
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Januari 2025

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 188.54/Kep.25-Hukham/2025  
TENTANG  
PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
2.	Pengangkatan Anak	
3.	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan	
4.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Provinsi Jawa Barat	
5.	Peraturan Internal ( <i>Hospital By Laws</i> ) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6.	Peraturan Internal Rumah Sakit ( <i>Hospital By Laws</i> ) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit ( <i>Medical Staff By Laws</i> ) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru	
7.	Peraturan Internal ( <i>Hospital By Laws</i> ) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat	
8.	Peraturan Internal ( <i>Hospital By Laws</i> ) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat	
9.	Peraturan Internal ( <i>Hospital By Laws</i> ) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat	
10.	Peraturan Internal ( <i>Hospital By Laws</i> ) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	



9B4C994453

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9B4C994453>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
11.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
12.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
13.	Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	
14.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
15.	Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
16.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Lanjut Usia	
18.	Pedoman Penyusunan Rencana Pelayanan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan	
19.	Penyelenggaraan Kemitraan Kepemudaan	
20.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa	
21.	Instrumen Evaluasi Kapasitas Pemerintahan Daerah	
22.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja sama Daerah	
23.	Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Barat	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
24.	Tata Cara Usulan, Penilaian, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
25.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah	
26.	Pedoman Kerja Sama dan Pembentukan Unit Usaha pada Badan Layanan Umum Daerah	
27.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat	
28.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
29.	Pusat Kesejahteraan Sosial/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat	
30.	Pengelolaan Barang Persediaan untuk Penanganan Sosial	
31.	Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas	
32.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	
33.	Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat	
34.	Badan Pengelolaan Cekungan Bandung	
35.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Barat	
36.	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah	
37.	Penyelenggaraan Penanganan Infrastruktur dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
38.	Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat	
39.	Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
40.	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
41.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
42.	Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah di Provinsi Jawa Barat	
43.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
44.	Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat	
45.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
46.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
47.	Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
48.	Subsidi Bunga Kredit dan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Kecil di Daerah Provinsi Jawa Barat	
49.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya Perkebunan, Penyuluh Swasta Perkebunan, Fasilitator Daerah Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
50.	Pengembangan Usaha Kopi Tahun 2023-2027	
51.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
52.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
53.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
54.	Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Petani Tembakau bagi Petani Tembakau	
55.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
56.	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
57.	Tata Cara Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah	
58.	Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
59.	Fasilitasi Asuransi Pertanian	
60.	Pembenihan Kentang Berkualitas di Jawa Barat	
61.	Kemitraan Pengelolaan Lahan antara Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Petani Penggarap	
62.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
63.	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
64.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah	
65.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
66.	Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
67.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
68.	Masyarakat Hukum Adat	
Asisten Administrasi Umum		



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
69.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
70.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
71.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
72.	Transformasi Digital	
73.	Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
74.	Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
75.	Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
76.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	
77.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	
78.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
79.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
80.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
81.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
82.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
83.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
84.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
85.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
86.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
87.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
88.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
89.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
90.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
91.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
92.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
93.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
94.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
95.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
96.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
97.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
98.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
99.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
100.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
101.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	

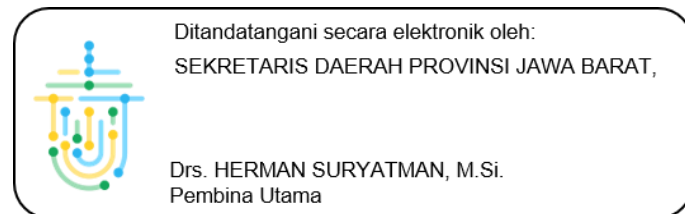


No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
102.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
103.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
104.	Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
105.	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	
106.	Perubahan Formulasi Bobot Penilaian Kinerja Jabatan Guru pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	
107.	Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi pada Jawa Barat <i>Corporate University</i>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
108.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
109.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
110.	Penilaian Barang Milik Daerah	
111.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
112.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
113.	Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
114.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
115.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
116.	Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tambah Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
117.	Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
118.	Tata Cara Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
119.	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah Provinsi Jawa Barat	

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



9B4C994453

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9B4C994453>